



**EVALUASI
PENANGANAN RUU DALAM PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2020
TANGGAL 24 FEBRUARI 2020**

I. RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN (PEMBICARAAN TINGKAT I)

N O.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR / KOMISI VII	Merupakan RUU Carry Over. Surpres Tgl 5 Juni 2018 No. R-29/Pres/06/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 2 Juli 2018 MP V 2017-2018 dibahas oleh Komisi VII
2.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH	Merupakan RUU Carry Over RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III MP. IV 2014-2015 sesuai Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 24 Juni 2015.
3.	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH	Merupakan RUU Carry Over Surpres Tgl 16 Juli 2018 No. R-34/Pres/07/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 6 September 2018 MP I 2018-2019 dibahas oleh Komisi XI
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH	Merupakan RUU Carry Over Surpres Tgl 12 November 2018 No. R-53/Pres/11/2018 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 29 November 2018 MP II 2018-2019 dibahas oleh Komisi III
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi	PEMERINTAH	Surpres Tgl 24 Januari 2020 No. R-05/Pres/01/2020 Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tgl 3 Februari 2020 MP II 2019-2020 dibahas oleh Komisi I

II. RUU AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBAHASAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR/Anggota	Surat Pengusul (2 orang Anggota dari Fraksi Gerindra) No.2127/II/2020, Tgl 5 Februari 2020, permintaan utk di harmonisasi Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
2.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas	DPR/Anggota/	RUU Kumulatif Terbuka Usul Anggota

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Kumulatif Terbuka	Surat Pengusul (a.n. Supratman Andi Agtas/FP-Gerindra), Nomor 128/II/2020, Tgl 3 Februari 2020 Selesai Harmonisasi Tgl 19 Februari 2020 Menunggu Paripurna Persetujuan Menjadi RUU Usul DPR
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (Dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020 adalah Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja) (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	Surpres tertanggal Februari 2020 Nomor Menunggu Penugasan Pembahasan oleh Bamus kepada AKD
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	PEMERINTAH	Surpres tertanggal Februari 2020 Nomor Menunggu Penugasan Pembahasan oleh Bamus kepada AKD

III. RUU DALAM TAHAP HARMONISASI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi	DPR/Anggota	Surat Pengusul (Desy Ratnasari/FPAN) No. 0028/DR.PAN/I/2020 tgl 27 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/Anggota	Surat Pengusul (23 Anggota dari FP Nasdem) No. F.NasDem.035/DPR-RI/I/2020 tgl 31 Januari 2020 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/Anggota	Surat Pengusul (12 Anggota FP Nasdem) No. F.NasDem.054/DPR-RI/II/2020 tgl 6 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga	DPR/Anggota	Surat Pengusul (5 org Anggota lintas Fraksi) tgl 7 Februari 2020 permintaan utk di harmonisasi Dlm Proses Harmonisasi

IV. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/Komisi I	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/Komisi I	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan	DPR/Komisi II	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/Komisi II	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/Komisi IV	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/Komisi IV	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/Komisi V	
8.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR/Komisi V	
9.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/Komisi VI	
10.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/Komisi VI	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
11.	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR/Komisi VII	
12.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/Komisi VIII	
13.	Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR/Komisi VIII	
14.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR/Komisi IX	
15.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/Komisi IX	
16.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	DPR/Komisi X	
17.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR/Komisi X	
18.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR/Komisi XI	
19.	Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	DPR/Badan Legislasi	
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Badan Legislasi	
21.	Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila	DPR/Badan Legislasi	<i>Dlm Tahap RDP/RDPU</i>
22.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/Badan Legislasi	<i>Dlm Tahap RDP/RDPU</i>
23.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Kesehatan Nasional	DPR/Anggota	
24.	Rancangan Undang-Undang tentang Kefarmasian (<i>Omnibus Law</i>)	DPR/Anggota	
25.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial	DPR/Anggota	
26.	Rancangan Undang-Undang tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional	DPR/Anggota	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
27.	Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak	DPR/Anggota	
28.	Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/Anggota	
29.	Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)	DPR/Anggota	
30.	Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	DPR/Anggota	

V. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	PEMERINTAH	
3.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
4.	Rancangan Undang-Undang tentang Ibukota Negara (<i>Omnibus law</i>)	PEMERINTAH	
5.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	
6.	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH	
7.	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	PEMERINTAH	

VI. RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPD RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan	DPD	

VII. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU

NO	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia (<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)	PEMERINTAH	RUU Kumulatif Terbuka. Disetujui Menjadi UU dlm Rapur Tgl 6 Februari 2020